

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan konsep hak untuk dilupakan ini dapat diterapkan pada korban tindak pidana yang informasi pribadinya tersebar di media *online* (internet) karena terdapat hak bagi setiap korban untuk terbebas dari setiap stigma negatif ataupun sebagai cara untuk membersihkan namanya dari pemberitaan yang mengandung unsur pornografi;
2. Konsep ini adalah sebuah konsep yang bagus dan inovatif, namun penerapan konsep hak untuk dilupakan ini belum efektif dan belum bisa diterapkan karena belum dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan belum efektifnya faktor-faktor lainnya, seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor budaya, dan faktor masyarakat.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Segera membuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai

amanat dari Pasal 26 ayat (5) Perubahan UU ITE dan peraturan-peraturan turunannya agar konsep hak untuk dilupakan dapat segera diterapkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;

2. Memperjelas makna dan batasan frasa “informasi yang tidak relevan” yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE, agar frasa tersebut tidak multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1999.
- Ade Armando, *Kemerdekaan Pers Bukan Kemerdekaan Absolut*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 2003.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Agustinus Pohan (et. al), *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2003.
- Atmakusumah Astraatmadja, *Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi*, dalam Bakti Nugroho & Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakarta, 2013.
- Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016.
- _____, *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, Dewan Pers, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Perdana Media Group, 2007.
- Bakti Nugroho & Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakarta, 2013.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jogiyanto H.M, *Analisis dan Desain Sistem Informasi (Edisi Kedua)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- K. Bertens, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Lukas Luwarso (et. al), *Mengelola Kebebasan Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- P A F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,

- Bandung, 1984
- _____ dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1995.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- _____ & Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Tata Sutabri, *Analisa Sistem Informasi*, Penerbit Andi Offset, Jakarta, 2012.
- Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Dewan Pers, Jakarta, 2012.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

B. Jurnal dan Makalah

- Court of Justice of the European Union, *Press Release No 70/14*, Curia, Luxembourg, 2014.
- Laporan Singkat Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM), Komisi I DPR RI, Jakarta, 20 Oktober 2016.
- Sinta Dewi, “*Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*”, *Yustisia*. Vol.5 No. 1 Januari - April 2016, Bandung, 2016, hlm. 25-26.
- Vidya Prahassacitta, “*The Concept Of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?*”, *Humaniora* Vol. 7 No. 4, Oktober 2016, hlm. 513.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Dewan Pers, *Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers*.

- _____, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Sekretariat Negara, Jakarta, 1997.
- _____, *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674, Sekretariat Negara, Jakarta, 1997.
- _____, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Sekretariat Negara, Jakarta, 1998.
- _____, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Sekretariat Negara, Jakarta, 1999
- _____, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, Sekretariat Negara, Jakarta, 1999.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Sekretariat Negara, Jakarta, 2002.
- _____, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Sekretariat Negara, Jakarta, 2006.
- _____, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Sekretariat Negara, Jakarta, 2008.
- _____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Sekretariat Negara, Jakarta, 2008.
- _____, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Sekretariat Negara, Jakarta, 2009.
- _____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Sekretariat Negara, Jakarta, 2012.
- _____, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Sekretariat Negara, Jakarta, 2016.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348, Sekretariat Negara, Jakarta, 2012.
- _____, *Peraturan Komunikasi Dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem*

Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1432, Sekretariat Negara, Jakarta, 2014.

_____, *Peraturan Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829, Sekretariat Negara, Jakarta, 2016.

D. Internet

- <http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-189>, pada tanggal 04 November 2018 pukul 10.00.
- <https://daerah.sindonews.com/read/1271922/21/ini-kronologis-pembuatan-video-mesum-anak-dan-wanita-dewasa-1515403463>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 21.00.
- <https://edisimedan.com/setelah-diarak-dan-dilucuti-bajunya-ternyata-bukan-pasangan-mesum/>, pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 10.30.
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&rid14>, pada tanggal 1 Desember 2018, pukul 11.00.
- <https://indowarta.com/57734/6-warga-ditetapkan-jadi-tersangka-persekusi-pasangan-diduga-mesum-di-tangerang/>, pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 10.45.
- https://www.kaskus.co.id/show_post/5a4f1f4ad44f9f121c8b456d/157/-, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.40.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pers>, pada tanggal 20 November 2018 pukul 21.15.
- https://kominfo.go.id/content/detail/13600/politikus-korup-bisa-minta-hak-untuk-dilupakan-tapi-ada-syaratnya/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.30.
- <https://news.okezone.com/read/2018/02/13/338/1859175/dihadirkan-di-persidangan-sejoli-korban-persekusi-di-tangerang-menangis>, pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 20.30.
- <https://pwi.or.id/index.php/uu-kej>, pada tanggal 30 November 2018 pukul 08.15.
- <http://rakyatjateng.fajar.co.id/2018/01/06/wanita-dewasa-dalam-video-porno-bocah-sd-bila-perlu-dihukum-mati-saja/>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 21.10.
- http://sipp.pn-tangerang.go.id/index.php/detil_perkara, pada tanggal 20 April 2019 pukul 20.45.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain>, pada tanggal 20 November 2018 pukul 21.10.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite>, pada tanggal 20 November 2018 pukul 21.00.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-dua-sejoli-di-cikupa-diarak-warga-dan-dipaksa-mengaku-berbuat-asusila.html>, pada tanggal 20 April 2019 pukul 20.10.

- <https://www.mivo.com/video/44601>, pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 11.00.
- Viviane Reding, *Building Trust in Europe's Online Single Market*, diakses dari <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/327>, pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 21.00.
- Wikipedia, *Google Spain v AEPD and Mario Costeja González*, diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Spain_v_AEPD_and_Mario_Costeja_González, pada tanggal 04 November 2018 pukul 09.20.
- _____, *Kejahatan dunia maya*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 14.00.
- _____, *Right to be forgotten*, diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_be_forgotten, pada tanggal 25 November 2018 pukul 14.00.
- <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00190478.html>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.50.
- <https://www.youtube.com/watch?v=H9Lkt24EuZA>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.20.
- <https://www.youtube.com/watch?v=TI9Hr2p5vZs>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.00.